

# Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Provinsi Jawa Timur : *Systematic Literature Review*

Viandi Adi Pramulia

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

[viandi.22101@mhs.unesa.ac.id](mailto:viandi.22101@mhs.unesa.ac.id)

Indonesia

081233790759

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai kerangka analisis utama. Kajian dilakukan terhadap lima studi kasus, yaitu Kampung Herbal Nginden Surabaya, RTH Kecamatan Kebomas Gresik, Taman Suroboyo Surabaya, Taman Tanjung Puri Sidoarjo, dan Aloon-Aloon Kota Madiun. Analisis enam indikator Dunn efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Jawa Timur masih belum merata. Surabaya menampilkan capaian terbaik pada sebagian besar indikator, sedangkan Gresik, Sidoarjo, dan Madiun menghadapi hambatan terkait keterbatasan fasilitas, ketidaksesuaian tata ruang, dan rendahnya partisipasi publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kerangka Dunn mampu mengungkap secara komprehensif kekuatan dan kelemahan kebijakan RTH, serta pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, konsistensi perencanaan ruang, dan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan RTH yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Evaluasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Systematic Literature Review*

## **I. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan wilayah perkotaan di Indonesia dalam tiga dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, terutama di provinsi dengan dinamika ekonomi tinggi seperti Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia dan pusat aktivitas ekonomi nasional di kawasan timur, Jawa Timur mengalami urbanisasi yang signifikan yang memicu ekspansi kawasan terbangun secara masif. Konversi lahan pertanian, ruang terbuka, dan kawasan ekologis menjadi permukiman, pusat perdagangan, kawasan industri, dan infrastruktur publik menjadi tren yang tidak terhindarkan. Proses urbanisasi tersebut menghasilkan tekanan besar terhadap penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), padahal Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, kualitas udara, resapan air, serta kenyamanan hidup masyarakat perkotaan.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 persen dari total luas wilayah, dengan komposisi 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan 10 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Regulasi

nasional ini memberikan landasan fundamental bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan ruang hijau yang memadai dalam struktur tata ruangnya. Selain itu, pedoman pelaksanaan di tingkat teknis juga diatur dalam berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri PUPR terkait penyediaan dan pemanfaatan RTH. Dengan demikian, setiap daerah di Jawa Timur berkewajiban menerjemahkan regulasi nasional ke dalam kebijakan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota berkelanjutan (*sustainable city*).

Provinsi Jawa Timur memiliki ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai kabupaten/kota tampak menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya merata. Wilayah-wilayah dengan tingkat urbanisasi yang cepat seperti kawasan metropolitan dan kota-kota yang berkembang pesat cenderung menghadapi tekanan penggunaan lahan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan dinamika pertumbuhan yang lebih stabil. Berdasarkan tinjauan awal terhadap sejumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja, dan publikasi akademik, terlihat bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan porsi RTH publik sebagaimana diamanatkan dalam aturan nasional. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kesenjangan antara ketentuan regulatif dan kondisi faktual yang berkembang di berbagai wilayah, meskipun gambaran detail setiap daerah masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dipetakan secara menyeluruh.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan beberapa dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah, termasuk laporan indikator pengelolaan RTH, diketahui bahwa capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) terkelola dalam kurun waktu 2021-2024 justru mengalami penurunan, meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa indikator pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama empat tahun terakhir tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah (Renstra) (tercantum dalam file dokumen hasil pencarian). Di sisi lain, data pembandingan tingkat provinsi menunjukkan bahwa beberapa kabupaten/kota seperti Kota Madiun mampu mencapai luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang jauh lebih tinggi, bahkan lebih dari 40 persen. Disparitas ini memperlihatkan bahwa penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh kapasitas perencanaan, tekanan urbanisasi, kemampuan anggaran, serta implementasi kebijakan di masing-masing daerah.

Permasalahan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur pun tidak hanya berkaitan dengan aspek luasan, tetapi juga aspek tata kelola (governance). Tantangan seperti keterbatasan lahan milik pemerintah, lemahnya koordinasi antarlembaga, kurang optimalnya perencanaan teknis, hingga efektivitas pelaksanaan kebijakan juga ditemukan dalam berbagai kajian terdahulu. File referensi yang dianalisis menunjukkan adanya hambatan implementatif mulai dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur pemeliharaan, hingga ketidaksesuaian capaian terhadap target tahunan yang ditetapkan pemerintah (hasil pencarian dokumen dalam file).

Karena itu, urgensi evaluasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tingkat Provinsi Jawa Timur menjadi sangat penting untuk dilakukan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pencapaian target RTH, serta memahami implikasinya terhadap tujuan pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city). Jawa Timur sebagai provinsi dengan konsentrasi urbanisasi besar memiliki peran strategis dalam mewujudkan kota yang resilien, berdaya dukung tinggi, dan adaptif terhadap perubahan iklim.

## II. METODE

Pendekatan sistematis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR ini dilakukan dengan dua proses yakni proses review dan proses mengidentifikasi jurnal dengan sistematis menggunakan panduan yang telah ditentukan (Triandini et al., n.d.) dengan di pandu oleh Preferred Reporting Items for Systematic Review and MetaAnalyses (PRISMA). PRISMA merupakan sebuah paduan yang berbasis diagram alur dan bukti yang di tujukan untuk membantu penulis tinjauan membuat literatur sistematis (Pati and Lorusso 2018). Dalam menggunakan metode SLR sangatlah penting penulis membuat evaluasi yang kritis karena akan memberikan dampak yang baik kepada pembaca, karenanya penulis membuat evaluasi yang berkaitan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Dalam tinjauan pustaka berbasis PRISMA terdapat tiga manfaat, yaitu: 1) Mendefinisikan pertanyaan secara metodis dan eksplisit, 2) Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, 3) Menentukan basis data literatur ilmiah dalam waktu yang telah ditentukan (Azril et al. 2018). Basis data dalam penelitian literatur ini menggunakan Google Scholar. Menurut (Will, 2016) dalam (Putra, Resta, Carsiwan, and Rahmat 2024) Website ini memudahkan peneliti dalam mencari publikasi jurnal yang dibutuhkan yang tentunya mudah dan cepat hanya dalam beberapa langkah.

Tabel 1 Proses Pencarian dalam Mengumpulkan Data

Pengambilan Data	Kata Kunci
Google Scholar	Keywords: "Evaluasi Kebijakan", "Ruang Terbuka Hijau" dan "Jawa Timur"

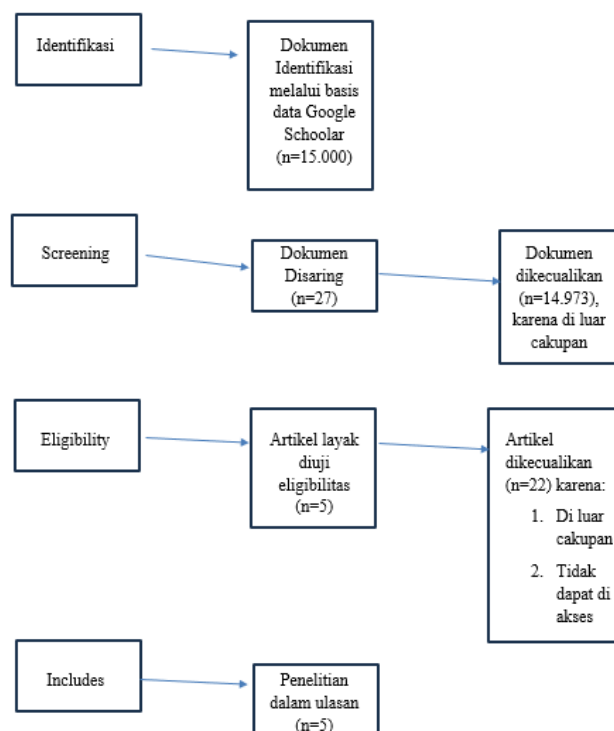
Sumber : Pribadi Penulis

Pada tahap penyaringan, peneliti akan memilah literatur secara sistematis. Selanjutnya pada tahap kelayakan, penulis menambahkan atau mengurangi dokumen berdasarkan kriteria stabilitas dan pemeriksaan kesesuaian dokumen. Disarankan agar artikel yang telah melalui tinjauan ekstensif untuk dikeluarkan dari prosedur tinjauan sistematis.

Penelitian ini menggunakan kriteria. kriteria tersebut adalah: 1) Menggunakan rentang waktu 10 tahun atau pada penelitian ini yaitu 2015 hingga 2025. Maka jika artikel yang dibuat diluar rentang waktu yang di tentukan tidak akan di masukan kedalam penelitian literatur review ini. 2) Tipe dokumen, Dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini adalah dokumen yang memiliki data empiris di dalamnya (Dokumen yang bersifat sekunder seperti review artikel, buku, Conference paper tidak akan dimasukan).

Berikut merupakan PRISMA Flowchart pada Gambar 1 yang akan memandu penelitian ini

Gambar 1 PRISMA Flowchart



Sumber : Pribadi Penulis 2025

No.	Judul	Penulis (tahun)	Metode	Hasil
1	EVALUASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN (STUDI PADA KAMPUNG HERBAL NGINDEN SURABAYA)	Purwanti & Weni Rosdiana, n.d. (2020)	Kualitatif William, N. Dunn	Penelitian menunjukkan bahwa Kampung Herbal Nginden cukup efektif sebagai paru-paru kecil kota dan ruang binaan warga, namun pengelolannya belum efisien karena tidak adanya



	SIDOARJO			<p>prasarana. Taman juga kurang dimanfaatkan oleh masyarakat akibat kurangnya sosialisasi, anggaran, serta rendahnya partisipasi publik. Potensinya besar, tetapi pengelolaan yang tidak konsisten menghambat pemanfaatannya sebagai ruang publik.</p>
5	EVALUASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MADIUN (STUDI PADA KAWASAN ALOON-ALOON KOTA MADIUN)	Deby Indrawaty & Prabawati, n.d. (2016)	Kualitatif William, N. Dunn	<p>Kebijakan RTH di Aloon-Aloon sudah efektif namun belum maksimal karena masih terdapat masalah seperti keberadaan pedagang kaki lima, pengemis, dan kurangnya pedoman teknis. Efisiensi pengelolaan cukup baik karena seluruh biaya ditanggung APBD dan masyarakat dapat menikmati fasilitas</p>

				<p>secara gratis. Respons masyarakat positif, tetapi partisipasi menjaga kebersihan dan fasilitas masih rendah.</p>
--	--	--	--	---

Sumber : Pribadi Penulis 2025

Setelah melewati tahap screening awal terhadap berbagai dokumen terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur, diperoleh lima dokumen utama yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu dokumen yang secara eksplisit melakukan evaluasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik dari aspek ekologis, kualitas ruang, maupun efektivitas kebijakan daerah. Selanjutnya pada tahap eligibility, kelima dokumen tersebut diperiksa kembali berdasarkan kesesuaian topik, metode analisis, serta kelayakan ilmiah sehingga seluruhnya memenuhi kriteria dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan utama. Setelah seluruh tahapan selesai, dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara mendalam dengan membaca ringkasan, keseluruhan isi, dan tema-tema utama yang muncul untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### III. HASIL DAN DISKUSI

RQ1 : Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur?

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian terkait implementasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di berbagai kota di Jawa Timur, tingkat efektivitas kebijakan menunjukkan pola yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya, efektivitas kebijakan terlihat dari keberhasilannya menciptakan ruang hijau fungsional yang berperan sebagai paru-paru kota sekaligus ruang interaksi warga. Namun demikian, efektivitas ini belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pengelolaan, seperti belum adanya pembukuan keuangan, kurangnya dukungan kelembagaan, dan ketidaksiapan kawasan untuk menjadi Kampung Wisata Herbal sebagaimana tujuan awal. Dengan kata lain, efektivitas di wilayah ini berjalan, tetapi belum mencapai seluruh target kebijakan secara optimal.

Di Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, efektivitas implementasi kebijakan RTH justru menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Penelitian menemukan berbagai kendala seperti kurangnya fasilitas, minimnya penanda aset pemerintah, serta lemahnya pemeliharaan RTH di beberapa lokasi. Walaupun pemerintah daerah telah melakukan upaya pengelolaan melalui Dinas Lingkungan Hidup, hasilnya belum sejalan dengan tujuan penataan RTH sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa kebijakan telah dilaksanakan, tetapi belum efektif dalam menghasilkan luaran (outcome) yang diharapkan, seperti kualitas lingkungan yang lebih baik dan pemanfaatan ruang yang lebih tertata.

Selanjutnya, pada Taman Tanjung Puri di Kabupaten Sidoarjo, implementasi kebijakan dinilai belum efektif karena pemanfaatan RTH tersebut tidak sesuai dengan standar RTRW Kabupaten Sidoarjo. Banyak fungsi RTH yang tidak berjalan sebagaimana direncanakan, ditambah dengan kurangnya sarana-prasarana serta minimnya pemanfaatan publik. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya anggaran, manajemen yang terfragmentasi, serta partisipasi masyarakat yang sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan efektivitas kebijakan terhambat sejak tahap input hingga output, sehingga tujuan penyediaan ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan tidak tercapai.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, Taman Suroboyo di Surabaya menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih baik. Pemerintah Kota Surabaya berhasil memanfaatkan lahan terbatas di Surabaya Utara untuk menciptakan RTH yang tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomis. Taman ini menjadi ruang publik yang aktif, dapat diakses semua lapisan masyarakat, serta mampu meningkatkan kualitas hidup warga. Meski demikian, terdapat beberapa aspek implementasi yang masih memerlukan perbaikan, seperti pemeliharaan fasilitas dan pemerataan penggunaan ruang, namun secara umum efektivitas kebijakan dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, pada Aloon-Aloon Kota Madiun, efektivitas implementasi kebijakan terlihat dari tingginya tingkat kunjungan masyarakat dan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan sarana olahraga, hiburan, dan interaksi sosial. Namun efektivitas keseluruhan belum optimal karena masih banyak permasalahan yang mengganggu tujuan kebijakan, seperti keberadaan pedagang kaki lima, pengemis, serta perilaku masyarakat yang kurang menjaga kebersihan fasilitas. Ketiadaan pedoman teknis terkait penertiban juga membuat pelaksanaan kebijakan kurang tegas sehingga mengurangi pencapaian efektivitas jangka panjang.

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi kebijakan RTH di Jawa Timur sangat bergantung pada kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, dukungan kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat. Wilayah yang memiliki manajemen kuat, dukungan kebijakan yang jelas, dan budaya partisipatif cenderung menunjukkan efektivitas tinggi seperti di Surabaya. Sebaliknya, wilayah yang menghadapi keterbatasan fasilitas, fragmentasi pengelolaan, serta minimnya partisipasi publik seperti Sidoarjo, Gresik, dan sebagian Madiun menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan RTH masih berada pada tingkat yang belum optimal. Dengan demikian, efektivitas di tingkat provinsi belum merata dan masih sangat ditentukan oleh kapasitas daerah dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai prinsip-prinsip keberlanjutan dan tata ruang yang baik.

RQ2: Bagaimana teori evaluasi William Dunn digunakan dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH)?

Penggunaan teori evaluasi William N. Dunn dalam implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur tampak jelas melalui analisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan pada tiap studi kasus yang ada dalam lima artikel.

#### 1. Dari aspek efektivitas,

Efektivitas kebijakan di Kampung Herbal Nginden tergolong cukup baik karena kawasan ini mampu berfungsi

sebagai ruang hijau yang mendukung kualitas lingkungan serta menjadi ruang sosial bagi warga. Kampung ini juga menjalankan fungsi edukasi tanaman herbal sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan, meskipun target sebagai Kampung Wisata Herbal belum sepenuhnya tercapai.

Efektivitas implementasi RTH di Kebomas masih terlihat dari keberadaan beberapa titik ruang hijau yang tetap dapat dimanfaatkan masyarakat dan fungsi ekologis dasar yang masih berjalan. Walaupun terdapat kendala fasilitas dan lahan, pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan sebagian area RTH melalui pemeliharaan rutin sehingga sebagian tujuan kebijakan tetap tercapai.

Efektivitas Taman Suroboyo tergolong tinggi karena taman ini berhasil menjadi ruang publik yang aktif, mudah diakses, dan digunakan oleh masyarakat untuk beragam aktivitas sosial, olahraga, maupun rekreasi. Keberadaannya juga memberikan kontribusi penting bagi kawasan Surabaya Utara yang sebelumnya kekurangan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tujuan ekologis dan sosial kebijakan dapat tercapai dengan baik.

Efektivitas Taman Tanjung Puri masih tampak dari kemampuannya menyediakan ruang hijau yang berfungsi sebagai penyejuk kota serta tempat berkumpul masyarakat. Walaupun pemanfaatannya belum optimal sesuai RTRW, taman ini tetap menjalankan fungsi dasar RTH sehingga memberikan manfaat ekologis dan sosial dasar bagi lingkungan sekitar.

Efektivitas Aloon-Aloon Madiun terlihat dari besarnya tingkat penggunaan masyarakat, keberhasilannya menjadi pusat kegiatan sosial, rekreasi, dan olahraga, serta kemampuannya berfungsi sebagai ikon kota. Fasilitas yang lengkap serta tingginya intensitas kunjungan membuat taman ini mencapai tujuan kebijakan sebagai ruang publik yang hidup dan inklusif.

#### 2. Dari sisi efisiensi,

Efisiensi pengelolaan Kampung Herbal Nginden menunjukkan hasil yang cukup baik karena kegiatan penghijauan dilakukan secara swadaya dan berbasis partisipasi warga, sehingga tidak memerlukan anggaran besar. Namun demikian, efisiensi ini belum mencapai tingkat maksimal karena belum adanya sistem pengelolaan keuangan dan pencatatan yang terstandar, meskipun aktivitas warga tetap mampu menjaga keberlanjutan ruang hijau tersebut.

Pada wilayah Kebomas, efisiensi kebijakan RTH terlihat dari upaya pemeliharaan rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup yang tetap berjalan meskipun anggaran terbatas. Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara berhati-hati dan menyesuaikan kapasitas daerah, sehingga beberapa area RTH masih dapat berfungsi meskipun tidak optimal. Efisiensi ini tercapai karena pemerintah tetap menjalankan pemeliharaan dasar meski menghadapi keterbatasan lahan dan fasilitas.

Efisiensi pengelolaan Taman Suroboyo relatif tinggi karena pemerintah mampu memaksimalkan lahan di kawasan pesisir Surabaya Utara yang sebelumnya kurang produktif. Pemanfaatan fasilitas dilakukan dengan baik, dan kegiatan masyarakat di taman berjalan tanpa menambah beban biaya berlebih bagi pengguna. Selain itu, pengelolaan terpadu oleh Pemkot Surabaya membuat penggunaan sumber daya lebih efektif dan terarah.

Efisiensi di Taman Tanjung Puri belum maksimal, namun penggunaan anggaran yang ada tetap mampu menjaga fungsi dasar RTH meskipun dana yang tersedia terbatas. Pengelolaan taman dilakukan secara sederhana untuk menjaga keberadaan ruang hijau, sehingga meskipun sarana-prasarana minim, taman tetap dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa biaya tambahan. Dengan pemanfaatan minimum tetapi tetap berfungsi, efisiensi dasar masih dapat dicapai.

Efisiensi pengelolaan Aloon-Aloon Madiun tergolong baik karena seluruh biaya operasional ditanggung APBD dan fasilitas tersedia gratis bagi masyarakat, sehingga manfaat sosialnya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Pemerintah mampu mempertahankan keberlanjutan taman sebagai ruang publik dengan pembiayaan yang stabil dan penggunaan fasilitas yang tinggi oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa RTH tersebut memberikan output maksimal dari input biaya yang relatif terkendali.

### 3. kecukupan (adequacy)

Tingkat kecukupan di Kampung Herbal Nginden terlihat dari kemampuannya menyediakan ruang hijau yang cukup untuk menunjang aktivitas warga serta meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman. Penggunaan tanaman herbal juga memperkaya fungsi ruang sehingga kebutuhan edukasi dan penghijauan dapat terpenuhi, meskipun standar sebagai Kampung Wisata Herbal belum seluruhnya tercapai.

Kecukupan kebijakan RTH di Kebomas masih terpenuhi pada tingkat dasar, karena beberapa area hijau tetap mampu menyediakan fungsi ekologis seperti resapan air dan peningkatan kualitas udara. Meski fasilitas dan lahan terbatas, keberadaan RTH yang ada masih cukup untuk memberikan manfaat minimal bagi masyarakat sekitar.

Taman Suroboyo menunjukkan kecukupan yang baik karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang luas, aman, dan fungsional. Fasilitas yang tersedia cukup mendukung aktivitas sosial, wisata, serta olahraga sehingga taman ini mampu menjawab kebutuhan ruang terbuka di wilayah yang padat dan minim RTH.

Kecukupan RTH di Taman Tanjung Puri masih terlihat meskipun belum sepenuhnya sesuai RTRW, karena taman tetap menyediakan fungsi penghijauan dan ruang rekreasi dasar bagi masyarakat. Walaupun sarana-prasarana tidak lengkap, keberadaan taman ini tetap cukup untuk menyediakan manfaat ekologis minimal di lingkungan perkotaan.

Aloon-Aloon Madiun memiliki tingkat kecukupan yang baik karena fasilitas yang tersedia cukup untuk melayani aktivitas masyarakat dalam jumlah besar. Ruang publik ini mampu menampung berbagai kebutuhan mulai dari rekreasi, olahraga, hingga interaksi sosial sehingga dapat dianggap cukup dalam memenuhi tujuan kebijakan RTH.

### 4. Komponen perataan (equity)

Perataan manfaat RTH di Kampung Herbal Nginden terlihat dari keterlibatan warga dalam kegiatan penghijauan dan pemanfaatan tanaman herbal yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat kampung. Ruang hijau tersedia bagi semua kelompok warga sehingga manfaat ekologis dan sosialnya dirasakan cukup merata di lingkungan permukiman.

Perataan akses RTH di Kebomas masih terjaga karena beberapa titik ruang terbuka dapat digunakan masyarakat sekitar, meski penyebarannya belum sepenuhnya merata. Ruang hijau yang sudah ada tetap memberikan manfaat dasar secara umum bagi warga di wilayah kecamatan, sehingga distribusi manfaat lingkungan masih dapat dirasakan secara cukup seimbang.

Taman Suroboyo menunjukkan tingkat perataan yang baik karena dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa biaya dan menjadi ruang publik yang sangat inklusif. Lokasinya di wilayah Surabaya Utara kawasan yang dulunya minim ruang hijau membuat manfaat taman ini hadir secara lebih merata untuk masyarakat yang sebelumnya kurang mendapat akses RTH.

Meskipun tidak sepenuhnya sesuai RTRW, Taman Tanjung Puri tetap memberikan perataan manfaat lingkungan bagi masyarakat sekitar karena menjadi ruang terbuka yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok. Penghijauan dan area rekreasinya memberikan kesempatan yang sama bagi warga untuk menikmati fungsi dasar RTH tanpa pembatasan tertentu.

Aloon-Aloon Madiun memiliki tingkat perataan yang tinggi karena ruang ini terbuka bagi semua orang dan fasilitasnya dapat digunakan secara gratis. Keberagaman aktivitas yang dapat dilakukan mulai dari olahraga, bersantai, hingga wisata keluarga menjadikannya ruang publik yang manfaatnya tersebar merata ke seluruh kelompok masyarakat.

### 5. responsivitas,

Responsivitas kebijakan di Kampung Herbal Nginden terlihat dari kemampuan kawasan ini menjawab kebutuhan warga akan ruang hijau yang sehat sekaligus ruang edukasi tanaman herbal. Masyarakat juga merasakan manfaat langsung dari keberadaan RTH yang mendukung aktivitas sosial dan lingkungan, sehingga kebijakan ini tergolong cukup responsif terhadap kebutuhan lokal.

RTH yang ada di Kebomas masih mampu merespons kebutuhan dasar masyarakat akan ruang terbuka untuk rekreasi ringan dan lingkungan yang teduh. Meski pemanfaatannya belum optimal, keberadaan area hijau tetap menyediakan manfaat ekologis dasar yang dibutuhkan warga di tengah keterbatasan lahan dan fasilitas.

Responsivitas Taman Suroboyo tergolong sangat baik karena taman ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat Surabaya Utara yang selama ini kekurangan ruang terbuka hijau. Taman tersebut menyediakan ruang publik luas dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan rekreasi, olahraga, wisata, dan aktivitas sosial warga, sehingga kebijakan sangat peka terhadap kondisi lingkungan dan aspirasi masyarakat.

Meskipun pemanfaatan belum optimal, Taman Tanjung Puri tetap menunjukkan responsivitas dasar dengan menyediakan ruang hijau yang dapat digunakan oleh warga sekitar kapan saja secara gratis. Kehadiran taman tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau yang menyejukkan dan dapat diakses publik secara luas.

Aloon-Aloon Madiun menunjukkan responsivitas tinggi karena mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat mulai dari olahraga, rekreasi, interaksi sosial hingga kegiatan wisata. Taman ini berkembang menjadi

pusat aktivitas kota yang sangat relevan dengan kebutuhan publik, sehingga kebijakan terbukti responsif terhadap aspirasi dan pola aktivitas warga.

#### 6. Terakhir, komponen ketepatan (appropriateness)

Ketepatan kebijakan di Kampung Herbal Nginden terlihat dari kesesuaian program penghijauan dan pemanfaatan tanaman herbal dengan karakter masyarakat dan kebutuhan lingkungan setempat. RTH yang dihadirkan tepat sebagai ruang hijau edukatif yang mendukung gaya hidup sehat warga, sehingga kebijakan ini relevan dengan kondisi sosial dan ekologis di kampung tersebut.

Kebijakan RTH di Kebomas cukup tepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan ruang hijau di tengah perkembangan wilayah yang cenderung padat. Pemeliharaan area RTH yang sudah ada menjadi langkah yang sesuai dengan kebutuhan dasar ekologis masyarakat, sehingga meski fasilitas tidak lengkap, kebijakan tetap relevan dengan kebutuhan lingkungan setempat.

Taman Suroboyo mencerminkan ketepatan kebijakan yang sangat baik karena pembangunannya menjawab permasalahan minimnya ruang terbuka hijau di Surabaya Utara. Kebijakan ini tepat sasaran karena menghadirkan ruang publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir untuk rekreasi, olahraga, dan aktivitas sosial, serta meningkatkan kualitas ekologis kawasan.

Meskipun belum sepenuhnya sesuai RTRW, Taman Tanjung Puri tetap menunjukkan ketepatan dasar karena mampu menyediakan ruang hijau yang diperlukan warga di wilayah yang mulai padat. Keberadaannya relevan dengan kebutuhan masyarakat akan tempat berkumpul, bersantai, dan menikmati suasana yang lebih sejuk, sehingga tetap dianggap tepat sebagai ruang publik.

Aloon-Aloon Madiun menunjukkan ketepatan kebijakan yang tinggi karena ruang publik ini sangat sesuai dengan karakter pusat kota dan kebutuhan warga akan area hiburan, rekreasi, serta kegiatan sosial. Fasilitas yang lengkap dan fungsi ruang yang beragam menjadikan kebijakan penyediaan RTH di lokasi ini tepat sasaran dan relevan terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

### Diskusi

Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori evaluasi William N. Dunn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Jawa Timur masih sangat bervariasi antarwilayah. Wilayah dengan pengelolaan kuat, fasilitas memadai, dan dukungan partisipasi publik seperti Surabaya menunjukkan pencapaian yang lebih baik pada seluruh komponen evaluasi Dunn. Sebaliknya, wilayah seperti Sidoarjo, Gresik, dan sebagian Madiun masih menghadapi hambatan struktural dan manajerial yang menyebabkan nilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, teori Dunn membantu memperlihatkan gambaran komprehensif mengenai aspek kebijakan mana yang telah berjalan efektif serta aspek mana yang masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan RTH di Jawa Timur.

RQ3 : Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan RTH

Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jawa Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang bervariasi di setiap daerah penelitian. Dari

sisi faktor pendukung, beberapa wilayah menunjukkan kekuatan pada aspek kebijakan, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Pada Taman Suroboyo Surabaya, dukungan pemerintah kota yang kuat, komitmen terhadap peningkatan RTH di wilayah dengan kepadatan tinggi, serta penyediaan fasilitas publik menjadi faktor pendukung utama yang membuat implementasi RTH berjalan relatif baik. Selain itu, respons positif masyarakat dalam menggunakan ruang publik turut memperkuat keberlanjutan taman tersebut. Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya, dukungan komunitas dan adanya kegiatan berbasis warga menjadi modal sosial yang memperkuat keberadaan RTH, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sedangkan pada Aloon-Aloon Madiun, dukungan anggaran APBD dan tersedianya fasilitas publik menjadi faktor yang membantu penyediaan sarana rekreasi bagi masyarakat. Dengan demikian, faktor pendukung umumnya berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah, tersedianya anggaran, dukungan masyarakat, dan fasilitas publik yang memadai.

Di sisi lain, faktor penghambat cenderung lebih dominan ditemukan di sebagian besar lokasi. Pada Kebomas Gresik, kendala utama terletak pada keterbatasan lahan, minimnya pemeliharaan, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi terkait identifikasi aset pemerintah yang mengakibatkan penataan RTH tidak berjalan optimal. Pada Taman Tanjung Puri Sidoarjo, penghambat terbesar adalah ketidaksesuaian pemanfaatan RTH dengan RTRW, kekurangan sarana-prasarana, anggaran yang terbatas, dan minimnya partisipasi masyarakat, yang membuat kebijakan tidak menghasilkan dampak sebagaimana ditargetkan. Kampung Herbal Nginden menghadapi hambatan berupa kurangnya pembukuan dan manajemen yang baik, ketidaksiapan sebagai Kampung Wisata Herbal, serta distribusi RTH yang tidak merata. Sementara di Aloon-Aloon Madiun, penghambat utama ialah keberadaan pedagang kaki lima, pengemis, perilaku pengunjung yang kurang menjaga kebersihan, serta absennya pedoman teknis yang mengatur penataan dan penertiban kawasan. Secara keseluruhan, faktor penghambat yang paling sering muncul meliputi keterbatasan fasilitas dan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antarinstansi, ketidaksesuaian dengan RTRW, dan penggunaan ruang yang tidak tertib.

Dengan memperhatikan seluruh temuan dari lima artikel, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH di Jawa Timur lebih sering dipengaruhi oleh hambatan struktural dan sosial dibandingkan dukungan yang kuat dan konsisten. Daerah yang memiliki dukungan kelembagaan dan politik yang solid, seperti Surabaya, cenderung memiliki lebih banyak faktor pendukung sehingga implementasi lebih efektif. Sementara daerah seperti Gresik, Sidoarjo, dan sebagian Madiun menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana, serta rendahnya kepedulian masyarakat menjadi penghambat yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi RTH tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kapasitas pelaksana, tata kelola lahan, komitmen anggaran, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.

### IV. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang beragam, dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, pengelolaan, dan dukungan masyarakat di

masing-masing wilayah. Surabaya melalui contoh Taman Suroboyo dan Kampung Herbal Nginden memperlihatkan kinerja implementasi yang relatif lebih baik, karena ditopang oleh komitmen pemerintah, kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan ruang publik yang hidup. Sebaliknya, wilayah seperti Kebomas Gresik, Tanjung Puri Sidoarjo, dan sebagian kawasan Aloon-Aloon Madiun menghadapi berbagai hambatan berupa keterbatasan fasilitas, ketidaksesuaian dengan RTRW, minimnya pemeliharaan, serta lemahnya partisipasi dan kedisiplinan publik, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai optimal.

Jika dianalisis melalui kerangka evaluasi William N. Dunn, terlihat bahwa indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan belum terwujud secara merata di seluruh daerah. Surabaya memperoleh skor lebih tinggi pada sebagian besar indikator karena pengelolaan yang terpadu dan dukungan anggaran yang memadai, sementara daerah lain menunjukkan kelemahan yang bersifat struktural maupun operasional. Berbagai faktor pendukung seperti dukungan pemerintah, ketersediaan anggaran, dan respons masyarakat berperan penting dalam mendorong keberhasilan implementasi. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya sarana-prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan lahan, serta perilaku masyarakat yang kurang tertib menjadi kendala utama bagi daerah dengan kapasitas tata kelola yang lebih rendah.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan RTH di Jawa Timur belum merata dan sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan, perencanaan tata ruang, kapasitas pelaksana, dan keterlibatan masyarakat. Untuk memperkuat implementasi ke depan, diperlukan peningkatan tata kelola, penyelarasan RT RW, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan publik agar manfaat ekologis, sosial, dan

estetika RTH dapat dicapai secara lebih luas dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- [1] Alifah Retno Wulandari, Anggraeny Puspaningtyas, & Adi Soesiantoro. (2024). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Taman Tanjung Puri Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 24–40. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1297>
- [2] Arlistasari, D., & Weni Rosdiana, H. (n.d.). EVALUASI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN KOTA KECAMATAN KEBOMAS KABUPATEN GRESIK.
- [3] Deby Indrawaty, Y., & Prabawati, I. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun (Studi pada Kawasan Aloon-Aloon Kota Madiun) Yunita Deby Indrawaty.
- [4] Margi Arum, Y. A., & Widiyarta, A. (2023). Evaluasi Kebijakan Penataan Ruang Berupa Ruang Terbuka Hijau di Taman Suroboyo Kota Surabaya. *NeoRepublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 143–160. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.154>
- [5] Nur, N., Karim, F., Hambali, B., Jejak, R., & Kunci, K. (2024). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENINGKATAN KESEHATAN MENTAL MELALUI OLAHRAGA Keterangan. In *Jurnal Olahraga dan Kesehatan Indonesia (JOKI)* (Vol. 4, Issue 2). <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JOK>
- [6] Purwanti, W., & Weni Rosdiana, Hj. (n.d.). EVALUASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN (Studi Pada Kampung Herbal Nginden Surabaya). <http://jatim.bps.go.id>
- [7] Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., Iswara, B., Studi, P., Informasi, S., Bali, S., Raya, J., & No, P. (n.d.). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. In *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)* (Vol. 1, Issue 2). <https://www.google.com>